



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Dias Tri Damara

0221 17 195

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

OKTOBER 2021

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019**

Skripsi

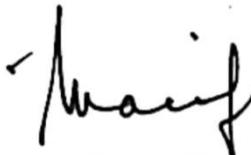
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto,
Ak., MBA., CMA., C.A., CSEP., QIA)



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Rabu, 05 Oktober 2021

Dias Tri Damara

022117195

disetujui,

Dosen Penguji
(Monang Situmorang, Drs., Ak., MM.,CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Ernadh Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE,
CfrA, CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(May Mulyaningsih, S.E, M.Ak., CFA.)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dias Tri Damara
Nomor Pokok Mahasiswa : 022117195
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 5 Oktober 2021

MATERAI Rp10.000,-

Dias Tri Damara
022117195

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DIAS TRI DAMARA. 022117195. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Di bawah bimbingan : ERNADHI SUDARMANTO dan MAY MULYANINGSIH. 2021.

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 27 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *area sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory survey*. Data diuji dengan menggunakan SPSS 25 dengan menggunakan uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi., Kenaikan PAD akan memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh kurang tepatnya kebijakan yang kurang tepat dalam mengalokasikan belanja modal sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.”**

Begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dan membantu serta mendorong penulis dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak Erwin Dalim dan Ibunda Iis Siti Aisyah, kakak yaitu Eris Astari Putra dan Egis Poetra serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan dalam bentuk apapun dan juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Chaidir, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak, CFE, CfrA, CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu May Mulyaningsih S.E M.Ak., CFA. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP. selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku yaitu Agil Maulana, Arif Fadli, Rifandi, Tasha Zetta, Mufti Lufti, Zulfahmi Rizki Rau, Yudha Ikawira, dan Reza Putra yang selalu menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
11. Risa Muharikah Az zahra yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam hal apapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2017, khususnya kelas E Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman semasa kuliah baik kakak tingkat maupun adik tingkat yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah menemani semasa perkuliahan.
14. Teman-teman semasa sekolah yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis memanjatkan doa semoga semua pihak yang disebutkan serta pihak-pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, mendapatkan anugrah dan barokah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin yarobal alamin.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bogor, 5 Oktober 2021

Dias Tri Damara

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Akademis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2. Fungsi Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah	14
2.2. Dana Perimbangan	14
2.2.1. Pengukuran Dana Perimbangan	16
2.3. Belanja Modal	17
2.3.1. Kebijakan Belanja Modal	19
2.3.2. Pengukuran Belanja Modal	19
2.4. Pertumbuhan Ekonomi	20
2.4.1. Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi	21
2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	22

2.4.3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	22
2.5. Penelitian Terdahulu	23
2.6. Kerangka Pemikiran	37
2.6.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2.6.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	38
2.6.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	38
2.7. Hipotesis Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	41
3.2.1. Objek.....	41
3.2.2. Unit Analisis.....	41
3.2.3. Lokasi Penelitian	41
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	42
3.4. Operasionalisasi Variabel	42
3.4.1. Variabel Independen	42
3.4.2. Variabel Dependen	42
3.5. Metode Penarikan Sampel	43
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	45
3.7. Metode Analisis Data	45
3.7.1. Statistik Deskriptif.....	45
3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
3.7.3. Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.3.1. Uji Normalitas	46
3.7.3.2. Uji Multikolinearitas.....	46
3.7.3.3. Uji Heterokedastisitas	47
3.7.3.4. Uji Autokorelasi	47
3.7.4. Uji Hipotesis.....	48
3.7.4.1. Uji t.....	48
3.7.4.2. Uji F.....	48
3.7.4.3. Koefisien Determinasi	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
4.1. Hasil Pengumpulan Data	49
4.1.1. Data Rata-rata per tahun Pendapatan Asli Daerah kab/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.....	50
4.1.2. Data dana perimbangan kab/kota di Jawa Barat tahun 2015- 2019	52

4.1.3. Data belanja modal kab/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019	54
4.1.4. Data Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan PDRB kab/kota di Provinsi Jawa Barat	56
4.2. Analisis Data	58
4.2.1. Statistik Deskriptif	62
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	64
4.2.2.1. Uji Normalitas	64
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas.....	65
4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas	66
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	67
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda	68
4.2.4. Uji Hipotesis.....	69
4.2.4.1. Uji t.....	69
4.2.4.2. Uji F.....	70
4.2.4.3. Koefisien Determinasi	71
4.3. Pembahasan.....	71
4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	72
4.3.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	72
4.3.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	73
4.3.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	74
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	75
5.2. Saran	76
5.2.1. Kegunaan Akademis	76
5.2.2. Kegunaan Praktis	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	82
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.2	: Matriks Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1	: Operasionalisasi Variabel	42
Tabel 3.2	: Populasi dan Pemilihan Sampel.....	44
Tabel 3.3	: Uji Durbin Waston	47
Tabel 4.1	: Sampel Penelitian kab/kota di provinsi Jawa Barat	49
Tabel 4.2	: Pendapatan Asli Daerah kab/kota di provinsi Jawa Barat 2015-2019	51
Tabel 4.3	: Dana Perimbangan kab/kota di provinsi Jawa Barat 2015-2019	53
Tabel 4.4	: Belanja Modal kab/kota di provinsi Jawa Barat 2015-2019.....	55
Tabel 4.5	: Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan menggunakan realisasi PDRB kab/kota di provinsi Jawa Barat 2015-2019.	57
Tabel 4.6	: Data Variabel Penelitan	58
Tabel 4.7	: Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.8	: Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4.9	: Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.10	: Hasil Uji Autokorelitas	68
Tabel 4.11	: Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda.....	69
Tabel 4.12	: Hasil Uji t (Uji Parsial)	70
Tabel 4.13	: Hasil Uji F (Uji Simultan)	71
Tabel 4.14	: Hasil Koefisien Determinasi	72
Tabel 4.15	: Hasil Hipotesis Penelitian.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Melalui Proksi PDRB di Kab/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	2
Gambar 1.2 : Rata-rata PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.....	4
Gambar 2.1 : Konstelasi Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 : Hasil Uji Heterokedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan PAD yang diproksikan menggunakan realisasi PAD kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.....	83
Lampiran 2 : Perhitungan Dana Perimbangan yang diproksikan menggunakan realisasi Dana Perimbangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.....	84
Lampiran 3 : Perhitungan Belanja Modal yang diproksikan menggunakan realisasi Belanja Modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019	86
Lampiran 4 : Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan menggunakan realisasi PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2016), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2016).

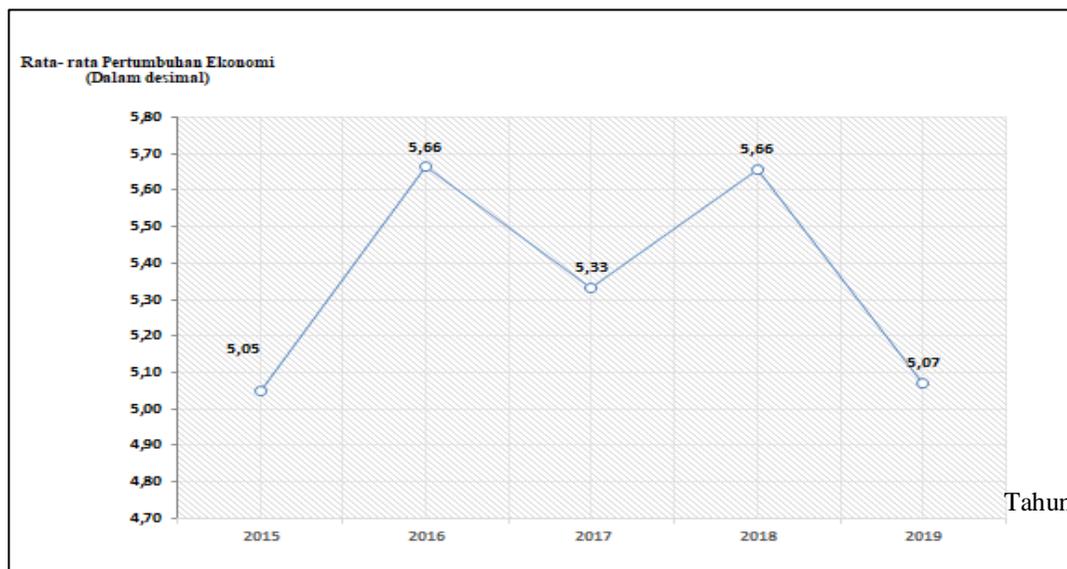
Menurut UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 174 Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Menurut Bastian (2016) di dalam asas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya kewenangan ke daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan Pembiayaan, Personalia, dan Perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak.

Berdasarkan data dari perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 5,07% *year on year* (yoy) melambat dibanding tahun 2018 yang mencapai 5,66% yoy. Namun demikian, realisasi ini masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02%. Perlambatan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS dan

China yang menahan kinerja ekspor dan industri pengolahan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Selain itu perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak *based year*, karena pada tahun 2018 lebih banyak faktor pendorong pertumbuhan yang sulit diimbangi di tahun 2019.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, menurut Djoyohadikusumo (1994:1) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari PDRB per kapitanya. PDRB yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah, ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Penetapan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan di kab/kota di provinsi Jawa Barat. Penetapan PDRB ini sebagai proksi mengikuti penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya, Siagian (2018), Saraswati (2017), dan Astuti (2015). PDRB di provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif. Berikut ini adalah data PDRB di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2020

Gambar 1.1

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Dengan Metode PDRB Berdasarkan Harga Konstan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

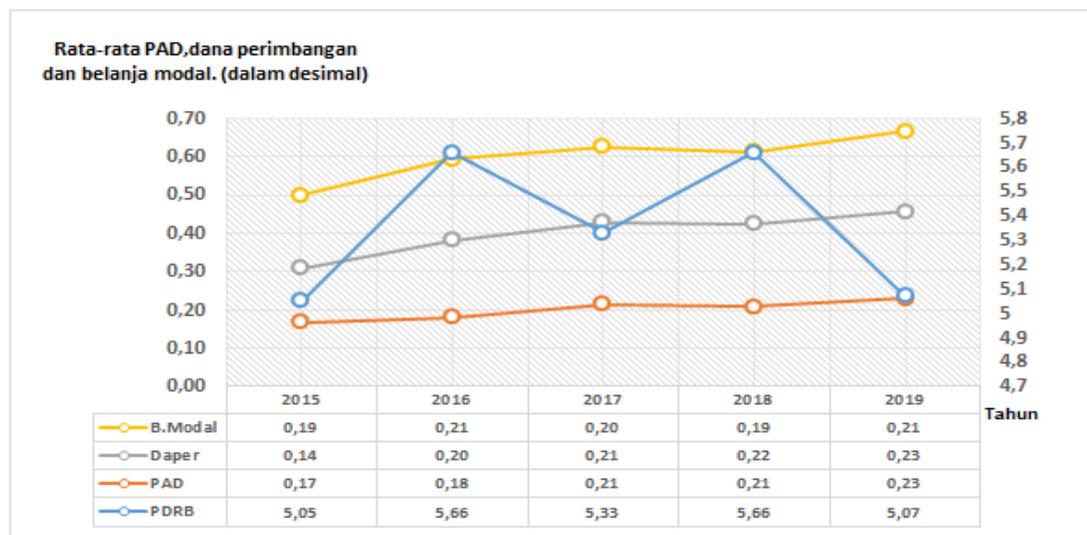
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi juga merupakan aspek jangka panjang, dimana suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama. Pada 5 tahun terakhir perekonomian di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2016 yaitu di angka 5,66 yang semula 5,05 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 5,33 yang semula di angka 5,66 pada tahun 2016. Dalam bi.go.id perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga dan perubahan inventori. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan terjadi pada LU utama seperti industri pengolahan dan konstruksi serta beberapa jenis LU berbasis jasa, meskipun tertahan dengan menurunnya kontribusi dari LU lainnya sehingga secara keseluruhan mengalami perlambatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun dalam penelitian ini akan diteliti beberapa faktor diantaranya Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

Faktor pertama, Menurut Nasir (2019) menerangkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pembiayaan asli daerah melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi PAD maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PAD akan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik dan peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor kedua, Dana Perimbangan adalah dana bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada penelitian ini dana perimbangan menggunakan proksi realisasi dana perimbangan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Faktor ketiga, Belanja Modal Bastian (2016) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam penelitian ini belanja modal menggunakan proksi realisasi belanja modal kab/kota di Jawa Barat. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Semakin tinggi belanja modal maka meningkatkan pembangunan di suatu daerah dengan demikian pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga mengalami peningkatan. Berikut ini disajikan gambar mengenai data rata-rata variabel penelitian yang akan diteliti pada Kab/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2020

Gambar 1.2

Rata-Rata PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diprosikan melalui realisasi PAD pada tahun 2015 mencapai 0,17, lalu pada tahun berikutnya yaitu 2016 PAD meningkat sebesar 0,01. Di tahun 2017 PAD Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh nilai PDRB mengalami penurunan sebesar 0,33. Pada tahun 2018 PAD di Provinsi Jawa Barat tidak mengalami kenaikan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,33 dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2019 PAD mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai PDRB mengalami penurunan sebesar 0,59 dari tahun sebelumnya. Dari data diatas terdapat gap atau kesenjangan pada tahun 2017 dan 2018. Adanya perbedaan antara teori dan kejadian sebenarnya. Padahal dalam teorinya PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah juga akan lebih tinggi. Kenaikan PAD seharusnya di barengi juga dengan kenaikan PDRB, tidak turun secara signifikan. Semakin tinggi PAD maka dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah, dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PAD akan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik dan peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang PAD terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Manek dan Badrudin (2017) dan Wiksuana (2018) menyatakan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan Suwandika (2015) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terdapat gap atau kesenjangan pada tahun 2017 dan 2019. Yaitu dana perimbangan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 dana perimbangan meningkat sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya, sedangkan PDRB mengalami penurunan sebesar 0,33. Lalu pada tahun 2019, dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 0,01 sedangkan PDRB mengalami penurunan sebesar 0,59. Dalam hal ini adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan karena dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keuangan daerah terutama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Untuk penelitian dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Irvan (2016) dan Karmini Paat dkk (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrudin dkk (2016) menemukan bahwa dana perimbangan dalam proyeksi dana bagi hasil tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas belanja modal dan PDRB mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018, belanja modal mengalami penurunan sebesar 0,01 sedangkan PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,33. Lalu pada tahun 2019, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0,02 sedangkan PDRB mengalami penurunan sebesar 0,59. Dalam hal ini dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan dimana grafik belanja modal dan PDRB tidak sesuai. Menurut Sitaniapessy (2013), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi pemerintah sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah.

Penelitian tentang belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Rizky dkk (2016), Sita (2017) dan Nofrizal, Haq, dan Surono (2017) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Ketidakkonsistenan penelitian yang dilakukan oleh Sita (2017), Wiksuana (2018) dan Rori (2016), Suwandika (2015), Rizky dkk (2016) mengenai pengaruh PAD, dana

perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi memotivasi peneliti untuk kembali melakukan penelitian tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak populasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 wilayah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka penelitian ini berusaha untuk meneliti bagaimana **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adanya fluktuasi rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi yang diprosikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun terakhir. Dampaknya jika nilai PDRB semakin membesar, potensi penerimaan pajak juga semakin tinggi. dengan jumlah nominal PDRB lebih tinggi plus asumsi pertumbuhan penduduk yang sama, maka pendapatan per kapita Indonesia akan semakin tinggi. Namun, jika PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran. Kemudian banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak bisa diukur secara pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi pada penelitian kali ini hanya mengambil beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Faktor pertama, PAD memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya penerimaan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor kedua yaitu dana perimbangan, besarnya penerimaan dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal. Dana perimbangan yang semakin meningkat maka akan meningkat juga pembangunan di suatu negara. Faktor ketiga yaitu belanja modal memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan per kapita.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada latar belakang mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) teori dengan kenyataan yang ada pada data penelitian. Hal itu terlihat dengan adanya ketidakkonsistenan antara variable independen dengan variable dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan lagi terutama dibidang infrastruktur agar bisa lebih merata. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan langkah apa yang seharusnya diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengatasi masalah tersebut. Selain itu , terdapat *inconsistency* hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terlihat dari adanya hasil penelitian yang tidak sama antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Perumusan Masalah

Sesuai yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Menyimpulkan hasil penelitian, serta memberi saran yang dapat membantu bagi penelitian selanjutnya. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu yang diterima dalam proses perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
2. Untuk menguji apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
3. Untuk menguji apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
4. Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, berikut adalah kegunaan penelitian:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal dan hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diharapkan menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih berikutnya serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti kajian yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. Untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019 mengenai Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Penelitian ini nantinya diharapkan agar mampu memberikan pandangan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

2. **Bagi Pemerintah pusat**
Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Barat dan sebagai pengetahuan perhitungan mengenai anggaran pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.
3. **Bagi Dinas Perpajakan**
Pada penelitian ini di harapkan mampu membantu untuk mengetahui besaran pajak yang didapat dari kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2015. Dan untuk membantu mempermudah dalam menganalisis pajak di kab/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Serta dapat dijadikan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat.
4. **Bagi Masyarakat**
Kepada masyarakat khusus daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai pengetahuan dan informasi mengenai dana yang didapatkan dari PAD, dana perimbangan dan belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepada masyarakat umum sebagai pengetahuan jika PAD, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber PAD sebagai mana disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah), lain-lain PAD yang sah.

Menurut Nasir (2019) menerangkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pembiayaan asli daerah melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya (Mardiasmo, 2012).

Menurut Mardiasmo (2016), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan bukan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Bastian, 2016).

2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan untuk Provinsi meliputi objek pendapatan berikut.

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Pajak balik nama kendaraan bermotor
- 3) Bea balik nama kendaraan di air
- 4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 5) Pajak air permukaan
- 6) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten /kota tersusun dari pajak berikut :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet
- 11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut menurut Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan perintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi penyajian kendaraan bermotor
- Retribusi penggantian beban cetak peta
- Retribusi pelayanan pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan kebersihan
- Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- Retribusi pengokohan limbah cair
- Retribusi penggantian bebas cetak peta
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi pelayanan tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah Provinsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi terminal
- 4) Terminal tempat penginapan/villa
- 5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah bersumber dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Jasa Giro
- 4) Pendapatan Bunga
- 5) Tuntutan Ganti Rugi
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari PAD tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. PAD merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

2.1.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber asli dari daerah itu sendiri dan diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus (Ndede, Sondakh, dan Pontoh, 2016) :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jadi dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan penunjang daerah yang digunakan untuk pembangunan di suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk kemajuan daerah, adapun pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula (Bastian, 2016:77). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya dana perimbangan untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Menurut subekan (2012), Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud :

1. Membantu daerah dalam mendanai kewarganegaraanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.
3. Mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.

Menurut Anggoro (2017), Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Dana Bagi Hasil

Jenis pendapatan APBN yang dibagihasilkan meliputi potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat. Berjalannya sistem transfer dalam BDH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Porsi pembagian dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21, serta Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditunjukkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna menimpangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan atas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasar UU No. 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal adalah 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Pendapatan dalam negeri bersih di APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi :

- 1) Layanan kesehatan
- 2) Layanan pendidikan
- 3) Penyediaan infrastruktur, dan
- 4) Pengentasan kemiskinan

Total belanja keempat layanan diatas merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan perhitungan DAU tersebut diukur berdasarkan :

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas wilayah
- 3) Indeks kemahalan konstruksi

- 4) Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- 5) Indeks pembangunan manusia.

Kapasitas fiskal daerah adalah total pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di luar sumber pendapatan pemerintah pusat dan diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dana bagi hasil adalah bagian daerah yang diperoleh dari APBN atas sumber-sumber pendapatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksud untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK utamanya ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah di pemerintah daerah, namun menjadi tambahan dana berupa DAK kesehatan dan DAK pendidikan.

2.2.1 Pengukuran Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Namun apabila dana perimbangan tinggi, maka daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat atau Provinsi, yang berarti daerah tersebut masih belum mandiri. Adapun rumus untuk menghitung besarnya dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Jadi dapat dilihat dana perimbangan adalah salah satu hal penting bagi kemajuan daerah, itu karena dana perimbangan digunakan untuk membantu suatu ketimpangan di daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya dan membantu daerah dalam mendanai kewarganegaraannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana

perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari beberapa bagian yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.3 Belanja Modal

Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS, 2009). Menurut Abdullah (2013), belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh. Pada kenyataannya beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli melalui lelang atau tender.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dikategorikan ke dalam belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang

secara finansial. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Klasifikasi aset tetap yang digunakan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- d. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) belanja modal dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian serta perawatan terhadap fisik lainnya yang

tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah (Kementerian Keuangan, 2017).

2.3.1 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, kebijakan belanja modal antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah dialokasikan kepada daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana peningkatan, dan pembangunan jalan/ jembatan.
- 2) Pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi.
- 3) Penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase.
4. Infrastruktur pelayanan, kesehatan rujukan rumah sakit.
- 4) Menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah.
- 5) Penyediaan prasarana sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).
- 6) Penyediaan prasarana pemerintah daerah.

Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier-effect* (efek jangka panjang baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

2.3.2 Pengukuran Belanja Modal

Belanja Modal adalah mengukur besar kecilnya belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi yang berhubungan erat dengan pembangunan publik. Dalam penelitian ini,

belanja modal menggunakan proksi realisasi anggaran dan total belanja daerah. Rumus untuk menghitung belanja modal menurut (Putro dan Pamudji: 2010) adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Biaya Tanah} + \text{Biaya Peralatan dan Mesin} + \text{Biaya Gedung dan Bangunan} + \text{Biaya Jalan, Biaya Irigasi dan Jaringan} + \text{Biaya Aset Tetap Lainnya.}$$

Jadi dapat dilihat bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang bertujuan memberi manfaat kepada suatu daerah dari hasil belanja tersebut. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya.

Menurut Robinson Tarigan (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sukirno (2014) Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat dengan adanya produksi barang dan jasa yang bertambah sehingga terdapat perkembangan kegiatan dalam perekonomian dengan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Sukirno, 1996 pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Romandhani, 2020).

2.4.1 Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi:

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat dapat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Makin tinggi PDB per kapita maka perekonomian pun terus bertumbuh dan peningkatan PDB per kapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

2) Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah output meningkat, itu mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja.

3) Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tanpa adanya Pertumbuhan Ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktivitas maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

4) Persiapan bagi Tahapan Kemajuan Berikutnya

Suatu perekonomian dalam sebuah negara dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu negara, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mendewasakan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan mereka membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memodernisasi perekonomiannya.

Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab sebuah

perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi melainkan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan ekonomi sosial modern.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo, Tatu, dan Sendow (2013), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri. Dari beberapa pendapat para peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) dapat dirumuskan :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan di (-) Tahun lalu

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinilitas dari penelitian. Adapun penelitian terhadap variabel-variabel yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ni Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota.	Variabel Independen : - Kinerja Keuangan Daerah (X)	Variabel Independen : Kinerja Keuangan : • rasio kemandirian : $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$ • rasio efektifitas : $\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Total Penerimaan PAD} \times 100\%$. • rasio efisiensi : $\text{Total Realisasi Belanja Daerah} / \text{Total}$	Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi (Y1) - Pengangguran Dan Kemiskinan (Y2) 	<p>Realisasi Penerimaan Daerah X 100%.</p> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi : $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ • Pengangguran : $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ • Kemiskinan : Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. • Sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan Headcount Index.		berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
2	Putu Candra Guntara dan A.A.N.B. Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali.	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (X1) - Dana Alokasi Umum (X2) Variabel Dependen : - Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah : Realisasi PAD Kab/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2005-2011. • Dana Alokasi Umum : Celah Fiskal + Alokasi Dasar. Variabel Dependen : • Pertumbuhan Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi :	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	• Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil uji simultan PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

No	Nama Peneliti,Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Moderasi : Belanja Modal (Z)</p>	<p>$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>Variabel Moderasi : Belanja Modal : Realisasi belanja modal</p>		<p>sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubasir.
3	Modebe, N.J , Regina G. Okafor , J.U.J	Variabel	Independen	Penelitian ini menggunakan	

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Onwumere and Imo G. Ibe. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth.</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recurrent Government Ependeture (X1). - Capital Recurrent Expendeture (X2). <p>Variabel Dependin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Economic Growth (Y) 	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pmerintah Berulang : RE • Belanja Modal Pemerintah : CE <p>Dependent variable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestic Bruto : GDPGR 	<p>model regresi berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang berasal dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sementara pengeluaran pemerintah berulang dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Belanja modal memiliki negative dan tidak signifikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga menggemakanke mbali kebutuhan untuk peningkatan dan dorongan investasi sektor swasta, sementara telah terbukti selama bertahun-tahun sebagai pemanfaatan SDA.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	<p>Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahendra Yasa. (2015).</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (X1) - Investasi (X2) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi (Y1) - Tingkat Pengangguran (Y2) 	<p>Variabel independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD = realisasi pendapatan asli daerah • Investasi = pertumbuhan ekonomi tahun 2002-2012 di kabupaten/kota di Provinsi Bali. <p>Variable dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi = realisasi pertumbuhan ekonomi • Tingkat pengangguran 	<p>Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (path analysis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis data menunjukkan, bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. • Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. • Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	<p>Wuku Astuti. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kinerja Keuangan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rasio kemandirian (X_1) - rasio efektifitas (X_2) - rasio efisiensi (X_3). <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi 	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kinerja Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rasio kemandirian : $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$ • rasio efektifitas : $\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Total Penerimaan PAD} \times 100\%$. • rasio efisiensi : $\text{Total Realisasi Belanja Daerah} / \text{Total Realisasi Penerimaan Daerah} \times 100\%$. <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi : $\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}$ 	Teknik analisis menggunakan regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. • Rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		(Y1) - Pengangguran (Y2) - Kemiskinan (Y3).	$PDRB_{t-1} \times 100\%$. <ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran : Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja $\times 100\%$. • Kemiskinan : Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan <i>Headcount Index</i>. 		pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan
6	Marianus Manek dan Rudy Badrudin. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan	Variable Independen : - Pendapatan Asli daerah (X1).	Variable Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli daerah : realisasi pendapatan asli daerah. 	Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data <i>time series</i> dan <i>crosssectional</i> antar kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	kemiskinan di Provinsi Nusa tenggara timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Perimbangan (X2) <p>Variable Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi (Y1) - - Kemiskinan (Y2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan : Realisasi dana perimbangan Kab/kota <p>Variable Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi : $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$. • Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut perhitungan BPS . 	di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	<p>yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.
7	Dodi Chandra; Syurya Hidayat; Rosmeli.	Variabel Independen : - Dana	Variabel Independen : • Dana	Analisis dilakukan secara deskriptif dan	

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>(2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.</p>	<p>Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>- Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Ketimpangan antar daerah</p>	<p>Perimbangan adalah dana perimbangan di Provinsi Jambi tahun 2001-2013 dalam satuan juta rupiah.</p> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2001-2013 dalam satuan persen. • Ketimpangan pendapatan adalah hasil 	<p>kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis menemukan bahwa: 1) rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 adalah sebesar Rp 3.854.250.067, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. • Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 sebesar 6,64 % pertahun. Selanjutnya rata-rata tingkat ketimpangan antar daerah adalah sebesar 0,38, yang terkategori sedang; 2) Dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jambi dalam satuan Indeks.		Provinsi Jambi.
8	<p>Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si.</p> <p>(2017).</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (X1) - Dana Perimbangan (X2) - Belanja Modal (X3). <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuha 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah : Realisasi PAD Kab/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2010-2012. • Dana Perimbangan : Realisasi dana perimbangan Kab/kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012 • Belanja Modal : Realisasi belanja modal Kab/Kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012 <p>Variabel Dependen :</p>	<p>Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan uji residual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil reserch ini menemukan, bahwa sebagian Pendapatan Daerah saja, dan Transfer Antar Pemerintah secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>n Ekonomi (Y)</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (X4).</p>	<p>• Pertumbuhan Ekonomi : Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012.</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Efisiensi = Realisasi Pengeluaran / Realisasi Penerimaan x 100%.</p>		<p>• Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.</p>
9	<p>Egi Nofrizal. (2017).</p> <p>Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>- Pertumbuhan ekonomi (X1)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>• Pertumbuhan ekonomi (X1) : Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota</p>	<p>Metode penarikan sampel dengan metode purposive sampling.</p>	<p>• Hasil penelitian ini bahwa perkembangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 untuk pertumbuhan ekonomi selalu</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan asli daerah (X2) <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal (Y). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah (X2) : Realisasi pendapatan asli daerah kab/kota. <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal (Y) : realisasi belanja modal. 		<p>mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Perkembangan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi.</p>
10	<p>Anindya Kurniasari (2019).</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (X1) - Dana Alokasi Umum (X2) - Dana Alokasi Khusus (X3) - Dana Bagi 	<p>Variable independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah (X2) : Realisasi pendapatan asli daerah kab/kota. • Dana Alokasi Umum : Celah Fiskal + Alokasi Dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Hasil (X4)</p> <p>- Belanja Modal (X)</p> <p>Dependent Variabel :</p> <p>- Pertumbuhan Ekonomi. (Y)</p>	<p>• Belanja Modal (Y) : realisasi belanja modal.</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>• Pertumbuhan ekonomi (X1) : Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota</p>		

Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yang meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis atau subyek yang diteliti, periode data yang diteliti dan metode yang digunakan. Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu PAD dengan penelitian Kurniasari (2019), Manek dan Badrudin (2017) dan Guntara dan Dwirandra (2014). Persamaan pada variabel independen yaitu Dana Perimbangan juga terdapat pada penelitian ini dengan penelitian Irvan dan Karmini (2016) dan Chandra, Hidayat et al (2017). Persamaan variabel independen yaitu belanja modal terdapat pada penelitian Novrizal (2017) dan Saraswati (2017), Dan juga memiliki persamaan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada penelitian Suwandika dan Yasa (2015) dan Wuku Astuti (2015)

Lalu penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan pada metode yang digunakan oleh Suwandika dan Yasa (2015), Bahrudin dkk (2016) dan pada penelitian Dewi dan Suputra (2017). Periode data pada penelitian saya menggunakan periode

2015-2019 berbeda dengan semua penelitian terdahulu. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan saya dalam mengerjakan penelitian ini.

Tabel 2.2
Matriks Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan	Pertumbuhan Ekonomi	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah	- Manek dan Badrudin (2017).	- Suwandika, P. E., dan Yasa, I. N (2015).
Dana Perimbangan	- Irvan, I. P., dan Karmini, N. L. (2016)	- Bahrudin dkk (2016)
Belanja Modal	- Nofrizal , Haq dan Surono, S. E (2017)	- Anindya Kurniasari (2019)

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2016), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Nasir (2019) menerangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pembiayaan asli daerah melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan efek positif

dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Manek dan Badrudin, (2017).

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

2.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari : 1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus, dan 3) Dana Bagi Hasil. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2019 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula (Bastian, 2016:77).

Hubungan positif dan signifikan antara variabel dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian terdahulu yaitu menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer di Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dengan Belanja di Pemerintah Daerah. Sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut (Irvan dan Karmini, 2016)

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

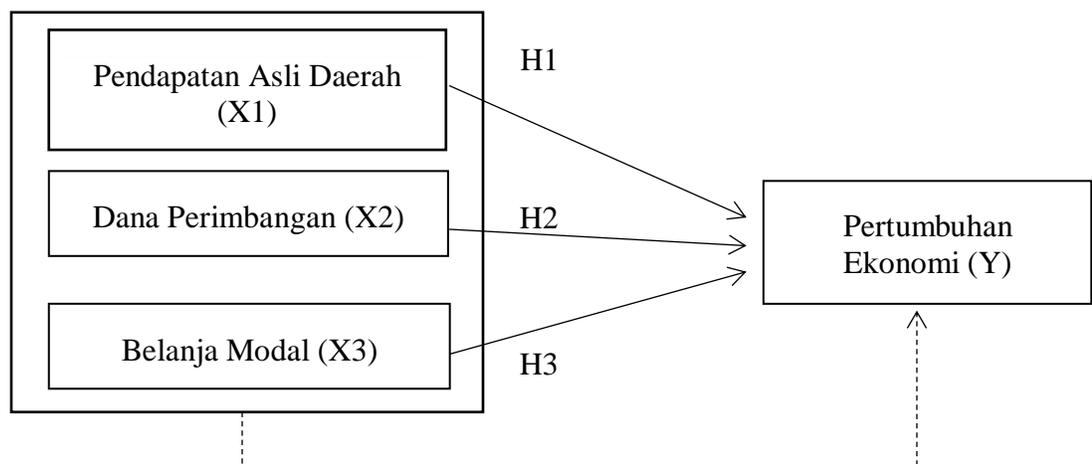
2.6.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut

dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2014).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus mengalokasikan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi tahun anggaran. Dengan demikian ini menjadi pemicu bagi para investor domestik/asing untuk menanamkan modalnya pada tanah, peralatan fisik, dan infrastruktur pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Egi Nofrizal , Haq dan Surono, 2017).

H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.



H4
Gambar 2.1
Konstelasi Penelitian

Keterangan:

- > = Berpengaruh secara parsial
- - - - -> = Berpengaruh secara simultan
- X1, X2, X3 = Variabel Independen
- Y = Variabel Dependen

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
- H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.
- H4 : Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis penelitian verifikatif menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel meliputi Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan realisasi pendapatan asli daerah (X1), Dana Perimbangan yang diproksikan dengan realisasi dana perimbangan (X2), Belanja Modal yang diproksikan dengan realisasi belanja modal (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang diproksikan dengan realisasi PDRB berdasarkan harga konstan, yang diungkapkan di dalam laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi dengan menggunakan Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data kuantitatif yang digunakan berupa data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*, maka dapat dikatakan data panel merupakan data dari beberapa subjek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (X3)

3.4.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Variabel Independen			
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Realisasi PAD Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	$PAD = HPD + RD + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + LPS$ Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah	Rasio

		HPD = Hasil Pajak Daerah RD = Retribusi Daerah LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah.	
Dana Perimbangan (X2)	Realisasi dana perimbangan Kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus.	Rasio
Belanja Modal (X3)	Realisasi belanja modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Belanja Modal = Biaya Tanah + Biaya Peralatan dan Mesin + Biaya Gedung dan Bangunan + Biaya Jalan, Biaya Irigasi dan Jaringan + Biaya Aset Tetap Lainnya.	Rasio
Variabel Dependen			
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dengan indikator Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2015.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan di (-) Tahun lalu	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2015) sampel dapat didefinisikan sebagai berikut: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.” Sampel dibutuhkan karena adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel data dokumen atau laporan realisasi APBD tahunan kab/kota Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode penarikan sampel yaitu area sampling. Area sampling adalah teknik penentuan sampel dengan cakupan daerah.

Alasan menggunakan teknik area sampling adalah karena untuk penentuan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, seperti misalnya

penduduk dari suatu negara, Provinsi atau dari suatu kabupaten (Margono, 2004). Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, karena populasi yang diteliti dalam penelitian ini semuanya masuk kriteria yang telah dibuat. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 27 kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Kabupaten/Kota melaporkan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.
3. Kabupaten/kota yang memiliki laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lengkap dari tahun 2015-2019. Kabupaten atau Kota yang menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah berturut tahun 2015-2019, dan kepada Badan Pusat Statistik pada tahun 2019.

Berdasarkan kriteria diatas, maka jumlah Kabupaten dan Kota yang akan dijadikan sampel sebanyak 27 yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan rincian sebagai berikut disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kabupaten	No	Kota
1	Kab. Kuningan	1	Kota. Bandung
2	Kab. Majalengka	2	Kota. Bekasi
3	Kab. Purwakarta	3	Kota. Bogor
4	Kab. Subang	4	Kota. Cirebon
5	Kab. Sukabumi	5	Kota. Depok
6	Kab. Sumedang	6	Kota. Sukabumi
7	Kab. Tasikmalaya	7	Kota. Tasikmalaya
8	Kab. Bandung Barat	8	Kota. Cimahi
9	Kab. Pangandaran	9	Kota. Banjar
10	Kab. Bogor		
11	Kab. Cianjur		
12	Kab. Bekasi		
13	Kab. Karawang		
14	Kab. Bandung		
15	Kab. Garut		

16	Kab. Ciamis		
17	Kab. Cirebon		
18	Kab. Indramayu		

Sumber data: Telah diolah www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021

Sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel di atas akan dijadikan sampel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Data yang dijadikan sampel setelah memenuhi kriteria yaitu seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat 2015-2019.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui komputer yaitu data sekunder berupa laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 diunduh melalui komputer. Data realisasi APBD yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dengan cara mengunduhnya dari *website* www.djpk.kemenkeu.go.id

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan data statistik melalui bantuan program SPSS 25. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi PAD yang diproksikan dengan realisasi PAD, dana perimbangan yang diproksikan dengan realisasi dana perimbangan dan belanja modal yang diproksikan dengan realisasi belanja modal. Menurut Ghozali (2018:19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*).

3.7.2. Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear (Selviani *et al.*, 2018).

Output coefficients yang menunjukkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Setelah disajikan hasil analisis regresi linear berganda, kemudian akan disajikan pula hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the estimate*) Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda. Adapun variabel independen terdiri dari PAD yang diproksikan dengan realisasi PAD, dana perimbangan yang diproksikan dengan realisasi dana perimbangan dan belanja modal yang diproksikan dengan realisasi belanja modal

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Pertumbuhan Ekonomi
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
X_1	: Pendapatan Asli Daerah
X_2	: Dana Perimbangan
X_3	: Belanja Modal
e	: <i>Error</i>

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji antar variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan nilai signifikan sebesar 0.05 dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan model baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai dari *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah:

- Jika nilai VIF > 10 atau *tolerance* < 0.10 maka terjadi multikolinieritas.
- Jika nilai VIF < 10 atau *tolerance* > 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.7.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model terjadi kesamaan varian dan residual antar variabel bebas. Penerapan model yang baik adalah yang memiliki hubungan homoskedastisitas yang artinya tidak adanya variance dan residual antar variabel bebas. Pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas, peneliti mengujinya dengan uji *scatterplots*. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan keputusan sebagai berikut :

- Jika membentuk suatu pola tertentu maka ada heteroskedastisitas.
- Jika tidak membentuk pola dan menyebar maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.7.3.4. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berdekatan satu dengan lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu diuji dengan Uji Durbin Watson yang digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstan) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi antara independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Uji Durbin Watson adalah:

Tabel 3.3
Uji Durbin Waston

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2018

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel maka variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai sig. $\leq 0,05$ maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan H_a diterima.
- Jika nilai sig. > 0.05 maka dikatakan tidak signifikan. Artinya H_a ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.4.2. Uji F

Uji statistik F yaitu ketepatan terhadap fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai yang aktual. Jika nilai signifikan $F < 0.05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model yang mempengaruhi secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0.05 (Ghozali, 2018). Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai signifikansi $F < 0.05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.4.3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan baik atau buruknya garis regresi sampel untuk data populasi. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1, nilai koefisien yang mendekati 0 memiliki arti semakin kecil kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian pada penelitian ini menggunakan dua variabel untuk diteliti. Variabel pertama adalah variabel independen atau variabel bebas (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan realisasi pendapatan asli daerah (X1), Dana Perimbangan yang diproksikan dengan realisasi dana perimbangan (X2) dan Belanja Modal yang diproksikan dengan realisasi belanja modal (X3). Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2015-2019. Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Populasi penelitian adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. setelah dilakukan *purposive sampling* maka diperoleh sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah semua sampel atau sampel jenuh. Metode pengumpulan data diperoleh dari media elektronik dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan APBD Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Sampel Penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

No	Kabupaten /Kota
1	Kab. Kuningan
2	Kab. Majalengka
3	Kab. Purwakarta
4	Kab. Subang
5	Kab. Sukabumi
6	Kab. Sumedang
7	Kab. Tasikmalaya
8	Kab. Bandung barat

No	Kabupaten /Kota
9	Kab. Pangandaran
10	Kab. Bogor
11	Kab. Cianjur
12	Kab. Bekasi
13	Kab. Karawang
14	Kab. Bandung
15	Kab. Garut
16	Kab. Ciamis
17	Kab. Cirebon
18	Kab. Indramayu
19	Kota. Bandung
20	Kota. Bekasi
21	Kota. Bogor
22	Kota. Cirebon
23	Kota. Depok
24	Kota. Sukabumi
25	Kota. Tasikmalaya
26	Kota. Cimahi
27	Kota. Banjar

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021

Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk sejak masa Kolonial Belanda tahun 1925. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tahun 1950, saat ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Pusat pemerintahannya di Bandung. Dengan luas 33.577,76 kilometer persegi atau sekitar 1,85 persen dari luas daratan Indonesia, Jawa Barat terluas kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Populasi penduduknya mencapai 49,93 jiwa (BPS 2019) dan terbanyak di Indonesia.

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal Pemerintah.

4.1.1. Data Rata-rata per tahun Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015 – 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah menggunakan proksi realisasi PAD. Berikut hasil pengumpulan data dan telah dilakukan perhitungan Pendapatan Asli Daerah yang di proksikan oleh realisasi pada pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019, ditunjukkan di dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun
2015-2019 (Dalam desimal)

PAD	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	0,16	0,17	0,26	0,21	0,20
Kab. Majalengka	0,14	0,16	0,25	0,22	0,22
Kab. Purwakarta	0,17	0,18	0,24	0,19	0,22
Kab. Subang	0,15	0,17	0,27	0,19	0,22
Kab. Sukabumi	0,17	0,18	0,26	0,19	0,20
Kab. Sumedang	0,15	0,16	0,26	0,20	0,22
Kab. Tasikmalaya	0,14	0,16	0,27	0,19	0,21
Kab. Bandung Barat	0,14	0,17	0,27	0,19	0,23
Kab. Pangandaran	0,15	0,15	0,19	0,25	0,26
Kab. Bogor	0,15	0,17	0,23	0,21	0,24
Kab. Cianjur	0,17	0,17	0,20	0,22	0,24
Kab. Bekasi	0,17	0,18	0,22	0,20	0,23
Kab. Karawang	0,18	0,17	0,21	0,20	0,23
Kab. Bandung	0,17	0,19	0,21	0,20	0,23
Kab. Garut	0,17	0,16	0,29	0,18	0,20
Kab. Ciamis	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24
Kab. Cirebon	0,16	0,18	0,26	0,19	0,21
Kab. Indramayu	0,16	0,16	0,27	0,20	0,21
Kota. Bandung	0,16	0,18	0,22	0,22	0,22
Kota. Bekasi	0,16	0,17	0,21	0,21	0,26
Kota. Bogor	0,15	0,18	0,23	0,21	0,24
Kota. Cirebon	0,16	0,18	0,22	0,22	0,22
Kota. Depok	0,15	0,17	0,23	0,20	0,24
Kota. Sukabumi	0,17	0,18	0,22	0,22	0,20
Kota. Tasikmalaya	0,17	0,18	0,25	0,20	0,20

Kota. Cimahi	0,16	0,17	0,20	0,20	0,22
Kota. Banjar	0,21	0,20	0,22	0,20	0,17
Rata-rata per tahun	0,16	0,17	0,24	0,20	0,22
Rata-rata penelitian	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang diprosikan oleh realisasi PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata pada tahun 2015 – 2019 sebesar 0,20. Kabupaten/kota yang berada di bawah rata-rata pada tahun 2015 – 2019 yaitu seluruh kabupaten/kota pada tahun 2015 dan 2016. Dilihat dari rata-rata tahun 2015 sebesar 0,16, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Pada tahun 2016 memiliki rata-rata per tahun 0,17, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada kabupaten Majalengka, kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2017 memiliki rata-rata per tahun 0,24, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kota Banjar.

Pada tahun 2018 memiliki rata-rata per tahun 0,20, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2019 memiliki rata-rata per tahun 0,22, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Penyebab dibawah rata-rata setiap daerah disebabkan kurangnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan juga daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

4.1.2. Data Rata-rata per tahun Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2019

Dana Perimbangan adalah suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada penelitian ini dana perimbangan menggunakan proksi realisasi dana perimbangan. Berikut hasil pengumpulan data dan telah dilakukan perhitungan dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun

2015-2019, ditunjukkan di dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Rata-rata per tahun Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 (Dalam desimal)

DANA PERIMBANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	0,17	0,21	0,21	0,20	0,21
Kab. Majalengka	0,21	0,26	0,03	0,25	0,25
Kab. Purwakarta	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23
Kab. Subang	0,16	0,21	0,21	0,21	0,22
Kab. Sukabumi	0,17	0,21	0,19	0,19	0,24
Kab. Sumedang	0,16	0,21	0,20	0,21	0,22
Kab. Tasikmalaya	0,16	0,21	0,21	0,21	0,22
Kab. Bandung Barat	0,16	0,20	0,22	0,21	0,22
Kab. Pangandaran	0,16	0,18	0,21	0,21	0,23
Kab. Bogor	0,19	0,19	0,20	0,20	0,22
Kab. Cianjur	0,16	0,20	0,21	0,21	0,21
Kab. Bekasi	0,18	0,21	0,20	0,21	0,21
Kab. Karawang	0,17	0,20	0,21	0,21	0,22
Kab. Bandung	0,16	0,20	0,20	0,21	0,23
Kab. Garut	0,16	0,20	0,21	0,21	0,22
Kab. Ciamis	0,17	0,18	0,22	0,21	0,23
Kab. Cirebon	0,17	0,22	0,21	0,17	0,22
Kab. Indramayu	0,17	0,21	0,20	0,20	0,22
Kota. Bandung	0,15	0,21	0,20	0,21	0,22
Kota. Bekasi	0,17	0,21	0,21	0,21	0,21
Kota. Bogor	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
Kota. Cirebon	0,19	0,21	0,20	0,20	0,20
Kota. Depok	0,17	0,20	0,21	0,21	0,22
Kota. Sukabumi	0,17	0,21	0,21	0,20	0,21
Kota. Tasikmalaya	0,16	0,20	0,21	0,21	0,21
Kota. Cimahi	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
Kota. Banjar	0,17	0,22	0,21	0,20	0,20

DANA PERIMBANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata per tahun	0,17	0,21	0,20	0,21	0,22
Rata-rata penelitian	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa dana perimbangan pada kab/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata nilai pada tahun 2015 – 2019 sebesar 0,20. Kabupaten/kota yang berada di bawah rata-rata pada tahun 2015 – 2019 yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun. Dilihat dari rata-rata per tahun 2015 sebesar 0,17, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi. Pada tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 0,21, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2017 memiliki rata-rata per tahun 0,20 yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2018 memiliki rata-rata per tahun 0,21, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Banjar. Pada tahun 2019 memiliki rata-rata per tahun 0,22, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar. Penyebab dibawah rata-rata setiap daerah bisa disebabkan permasalahan dimensi politik dan indikasi penyelewengan dana transfer yang menyebabkan program-program pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan baik.

4.1.3. Data Rata-rata per tahun Belanja Modal pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019

Belanja Modal merupakan alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan tanah, gedung, yang akan menjadi aset perusahaan. Pada penelitian ini belanja modal menggunakan proksi realisasi belanja modal. Berikut hasil pengumpulan data dan telah dilakukan perhitungan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, ditunjukkan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Data Rata-rata per tahun Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2015-2019 (Dalam desimal)

BELANJA MODAL	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	0,26	0,22	0,22	0,15	0,17
Kab. Majalengka	0,21	0,20	0,19	0,21	0,20
Kab. Purwakarta	0,22	0,18	0,26	0,14	0,20
Kab. Subang	0,20	0,22	0,20	0,20	0,19
Kab. Sukabumi	0,18	0,20	0,19	0,22	0,21
Kab. Sumedang	0,22	0,18	0,20	0,16	0,24
Kab. Tasikmalaya	0,16	0,25	0,19	0,18	0,22
Kab. Bandung Barat	0,22	0,21	0,23	0,15	0,20
Kab. Pangandaran	0,16	0,13	0,25	0,17	0,29
Kab. Bogor	0,20	0,21	0,21	0,18	0,21
Kab. Cianjur	0,16	0,17	0,23	0,26	0,19
Kab. Bekasi	0,22	0,25	0,19	0,16	0,18
Kab. Karawang	0,19	0,17	0,22	0,21	0,21
Kab. Bandung	0,19	0,15	0,17	0,19	0,29
Kab. Garut	0,20	0,21	0,21	0,19	0,19
Kab. Ciamis	0,20	0,22	0,18	0,18	0,21
Kab. Cirebon	0,16	0,22	0,22	0,19	0,21
Kab. Indramayu	0,17	0,22	0,19	0,18	0,24
Kota. Bandung	0,23	0,22	0,16	0,18	0,21
Kota. Bekasi	0,22	0,25	0,21	0,13	0,19
Kota. Bogor	0,19	0,23	0,18	0,19	0,21
Kota. Cirebon	0,22	0,24	0,18	0,14	0,22
Kota. Depok	0,15	0,24	0,20	0,18	0,22
Kota. Sukabumi	0,18	0,22	0,24	0,15	0,21
Kota. Tasikmalaya	0,16	0,20	0,22	0,19	0,23
Kota. Cimahi	0,14	0,22	0,21	0,22	0,21
Kota. Banjar	0,18	0,26	0,20	0,18	0,19

BELANJA MODAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata per tahun	0,19	0,21	0,21	0,18	0,21
Rata-rata penelitian	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa belanja modal memiliki rata-rata pada tahun 2015 – 2019 sebesar 0,20. yang berada di bawah rata-rata yaitu seluruh kabupaten/kota pada tahun 2015 dan 2018. Dilihat dari rata-rata tahun 2015 sebesar 0,19, yang di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar. Hal itu bisa terjadi karena belanja modal yang dikeluarkan pemerintah dialokasikan pada infrastruktur yang kurang produktif. Pada tahun 2016 memiliki rata-rata per tahun 0,21, yang di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung dan Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2017 memiliki rata-rata per tahun 0,21, yang di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Banjar.

Pada tahun 2018 memiliki rata-rata per tahun 0,18, yang berada di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Sukabumi. Pada tahun 2019 memiliki rata-rata per tahun 0,21, yang berada di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi dan Kota Banjar. Penyebab dibawah rata-rata setiap daerah karena dana yang dialokasikan setiap daerah dikeluarkan pada infrastruktur yang kurang produktif dan hasil alokasi belanja modal di setiap daerah belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang dekat.

4.1.4. Data Rata-rata per tahun Pertumbuhan Ekonomi yang menggunakan proksi realisasi PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2015-2019.

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atau pendapatan output per kapita. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi menggunakan proksi PDRB. Berikut hasil pengumpulan data dan telah dilakukan perhitungan PDRB pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, ditunjukkan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Data Rata-rata per tahun Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan menggunakan realisasi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2015-2019
(Dalam desimal)

PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
Kab. Majalengka	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
Kab. Purwakarta	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Subang	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Sukabumi	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Sumedang	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Tasikmalaya	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Bandung Barat	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Pangandaran	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Bogor	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Cianjur	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Bekasi	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Karawang	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Bandung	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Garut	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Ciamis	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Cirebon	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kab. Indramayu	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
Kota. Bandung	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23
Kota. Bekasi	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kota. Bogor	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kota. Cirebon	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kota. Depok	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23

PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
Kota. Sukabumi	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kota. Tasikmalaya	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Kota. Cimahi	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
Kota. Banjar	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Rata-rata per tahun	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Rata-rata penelitian	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh realisasi PDRB pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 memiliki rata-rata nilai PDRB pada tahun 2015 – 2019 sebesar 0,20 . yang berada di bawah rata-rata yaitu seluruh kabupaten/kota tahun 2015 dan 2016. Dilihat dari rata-rata tahun 2015 sebesar 0,18, yang berada di bawah rata-rata yaitu pada Kota Bandung dan Kota Depok. Pada tahun 2016 memiliki rata-rata per tahun 0,19. Pada tahun 2017 memiliki rata-rata per tahun 0,20. Pada tahun 2019 memiliki rata-rata per tahun 0,21. Pada tahun 2019 memiliki rata-rata perusahaan 0,22.

4.2. Analisis Data

Pengujian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019” dilakukan dengan pengujian analisis regresi linier berganda. Beberapa pengujian yaitu, Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas dan uji autokorelasi), dan Uji Hipotesis (uji t dan uji f , dan uji koefisien determinasi). Berikut ini disajikan data keseluruhan variabel penelitian yang akan diuji data :

Tabel 4.6
Data Variabel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y (Pertumbuhan Ekonomi)	X1 (PAD)	X2 (Daper)	X3 (B.Modal)
1	Kab Kuningan	2015	0,1764	0,1557	0,1673	0,2583
		2016	0,1871	0,1722	0,2090	0,2157
		2017	0,1990	0,2612	0,2096	0,2152
		2018	0,2118	0,2060	0,2023	0,1455
		2019	0,2257	0,2048	0,2119	0,1653
2	Kab Majalengka	2015	0,1757	0,1405	0,2071	0,2078
		2016	0,1862	0,1642	0,2612	0,1953

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y (Pertumbuhan Ekonomi)	X1 (PAD)	X2 (Daper)	X3 (B.Modal)
		2017	0,1989	0,2545	0,0256	0,1873
		2018	0,2110	0,2229	0,2527	0,2107
		2019	0,2282	0,2179	0,2534	0,1990
3	Kab Purwakarta	2015	0,1797	0,1712	0,1657	0,2214
		2016	0,1905	0,1764	0,1931	0,1762
		2017	0,2002	0,2443	0,1969	0,2577
		2018	0,2102	0,1907	0,2191	0,1411
		2019	0,2194	0,2174	0,2252	0,2037
4	Kab Subang	2015	0,1810	0,1481	0,1627	0,1969
		2016	0,1907	0,1701	0,2056	0,2153
		2017	0,2005	0,2742	0,2070	0,1997
		2018	0,2093	0,1890	0,2095	0,1997
		2019	0,2185	0,2186	0,2152	0,1884
5	Kab Sukabumi	2015	0,1781	0,1674	0,1714	0,1799
		2016	0,1885	0,1804	0,2132	0,1953
		2017	0,1993	0,2627	0,1881	0,1933
		2018	0,2108	0,1858	0,1895	0,2176
		2019	0,2232	0,2037	0,2378	0,2139
6	Kab Sumedang	2015	0,1776	0,1543	0,1616	0,2196
		2016	0,1877	0,1630	0,2051	0,1834
		2017	0,1994	0,2607	0,2030	0,1965
		2018	0,2110	0,2037	0,2086	0,1617
		2019	0,2243	0,2184	0,2218	0,2387
7	Kab Tasikmalaya	2015	0,1780	0,1391	0,1630	0,1580
		2016	0,1885	0,1613	0,2075	0,2518
		2017	0,1997	0,2994	0,2078	0,1934
		2018	0,2111	0,1853	0,2062	0,1793
		2019	0,2226	0,2150	0,2155	0,2175
8	Kota Bandung	2015	0,1726	0,1588	0,1547	0,2277
		2016	0,1861	0,1838	0,2141	0,2217
		2017	0,1995	0,2202	0,2007	0,1625
		2018	0,2136	0,2196	0,2127	0,1795
		2019	0,2281	0,2176	0,2177	0,2086
9	Kota Bekasi	2015	0,1779	0,1570	0,1675	0,2156

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3
			(Pertumbuhan Ekonomi)	(PAD)	(Daper)	(B.Modal)
		2016	0,1887	0,1685	0,2070	0,2463
		2017	0,1995	0,2085	0,2057	0,2132
		2018	0,2112	0,2098	0,2079	0,1345
		2019	0,2226	0,2561	0,2120	0,1905
10	Kota Bogor	2015	0,1761	0,1454	0,1580	0,1850
		2016	0,1880	0,1815	0,2128	0,2318
		2017	0,1995	0,2266	0,2079	0,1819
		2018	0,2118	0,2113	0,2068	0,1911
		2019	0,2246	0,2353	0,2145	0,2102
11	Kota Cirebon	2015	0,1772	0,1598	0,1894	0,2154
		2016	0,1880	0,1814	0,2134	0,2426
		2017	0,1989	0,2218	0,2008	0,1793
		2018	0,2113	0,2200	0,1995	0,1430
		2019	0,2245	0,2169	0,1969	0,2197
12	Kota Depok	2015	0,1740	0,1543	0,1729	0,1470
		2016	0,1867	0,1739	0,1983	0,2432
		2017	0,1991	0,2283	0,2058	0,2047
		2018	0,2127	0,1998	0,2054	0,1839
		2019	0,2275	0,2438	0,2176	0,2211
13	Kota Sukabumi	2015	0,1790	0,1704	0,1696	0,1804
		2016	0,1891	0,1818	0,2083	0,2231
		2017	0,1994	0,2210	0,2075	0,2356
		2018	0,2104	0,2231	0,2041	0,1521
		2019	0,2220	0,2037	0,2104	0,2088
14	Kota Tasikmalaya	2015	0,1761	0,1707	0,1594	0,1634
		2016	0,1883	0,1788	0,2023	0,1986
		2017	0,1997	0,2493	0,2092	0,2179
		2018	0,2116	0,1967	0,2150	0,1919
		2019	0,2242	0,2044	0,2141	0,2282
15	Kota Cimahi	2015	0,1778	0,1644	0,1644	0,1432
		2016	0,1878	0,1750	0,2051	0,2179
		2017	0,1980	0,2348	0,2148	0,2141
		2018	0,2092	0,2049	0,2062	0,2186
		2019	0,2273	0,2208	0,2096	0,2062

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3
			(Pertumbuhan Ekonomi)	(PAD)	(Daper)	(B.Modal)
16	Kota Banjar	2015	0,1797	0,2071	0,1699	0,1779
		2016	0,1899	0,2011	0,2219	0,2576
		2017	0,1999	0,2169	0,2075	0,1966
		2018	0,2100	0,2008	0,2005	0,1770
		2019	0,2206	0,1741	0,2003	0,1909
17	Kab Bandung Barat	2015	0,1794	0,1398	0,1572	0,2160
		2016	0,1896	0,1671	0,1985	0,2053
		2017	0,1995	0,2709	0,2152	0,2309
		2018	0,2104	0,1876	0,2068	0,1527
		2019	0,2211	0,2346	0,2223	0,1951
18	Kab Pangandaran	2015	0,1798	0,1464	0,1639	0,1564
		2016	0,1893	0,1507	0,1847	0,1300
		2017	0,1990	0,1898	0,2146	0,2516
		2018	0,2098	0,2525	0,2083	0,1679
		2019	0,2220	0,2606	0,2285	0,2941
19	Kab Bogor	2015	0,1776	0,1506	0,1854	0,1970
		2016	0,1880	0,1724	0,1932	0,2081
		2017	0,1991	0,2288	0,1969	0,2059
		2018	0,2115	0,2102	0,2023	0,1773
		2019	0,2238	0,2378	0,2221	0,2116
20	Kab Cianjur	2015	0,1770	0,1720	0,1633	0,1597
		2016	0,1884	0,1722	0,2034	0,1693
		2017	0,1992	0,2025	0,2078	0,2262
		2018	0,2116	0,2156	0,2120	0,2551
		2019	0,2237	0,2378	0,2135	0,1897
21	Kab Bekasi	2015	0,1801	0,1738	0,1762	0,2221
		2016	0,1888	0,1808	0,2101	0,2482
		2017	0,1995	0,2179	0,2010	0,1851
		2018	0,2116	0,1974	0,2070	0,1627
		2019	0,2199	0,2300	0,2058	0,1820
22	Kab Karawang	2015	0,1775	0,1766	0,1659	0,1883
		2016	0,1892	0,1677	0,2002	0,1713
		2017	0,2004	0,2337	0,2061	0,2224
		2018	0,2134	0,1954	0,2093	0,2082

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y (Pertumbuhan Ekonomi)	X1 (PAD)	X2 (Daper)	X3 (B.Modal)
		2019	0,2195	0,2267	0,2185	0,2098
23	Kab Bandung	2015	0,1765	0,1731	0,1559	0,1911
		2016	0,1877	0,1891	0,2018	0,1536
		2017	0,1993	0,2068	0,2030	0,1695
		2018	0,2117	0,2047	0,2116	0,1923
		2019	0,2247	0,2263	0,2276	0,2935
24	Kab Garut	2015	0,1798	0,1743	0,1617	0,2008
		2016	0,1904	0,1602	0,1954	0,2073
		2017	0,1998	0,2879	0,2103	0,2134
		2018	0,2097	0,1752	0,2077	0,1866
		2019	0,2202	0,2023	0,2249	0,1919
25	Kab Ciamis	2015	0,1789	0,1629	0,1701	0,2005
		2016	0,1897	0,1850	0,1791	0,2237
		2017	0,1995	0,2015	0,2173	0,1840
		2018	0,2104	0,2119	0,2062	0,1800
		2019	0,2214	0,2387	0,2273	0,2117
26	Kab Cirebon	2015	0,1801	0,1590	0,1721	0,1594
		2016	0,1903	0,1757	0,2196	0,2213
		2017	0,1999	0,2589	0,2111	0,2210
		2018	0,2099	0,1943	0,1739	0,1852
		2019	0,2198	0,2121	0,2232	0,2131
27	Kab Indramayu	2015	0,1959	0,1617	0,1710	0,1708
		2016	0,1960	0,1637	0,2105	0,2243
		2017	0,1988	0,2692	0,2006	0,1856
		2018	0,2013	0,1957	0,2025	0,1842
		2019	0,2079	0,2098	0,2154	0,2351

Sumber: Data diolah dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2021.

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	135	.14	.30	.2000	.03427
DAPER	135	.03	.26	.2000	.02552
BELANJA MODAL	135	.13	.29	.2000	.03013
PDRB	135	.17	.23	.2000	.01584
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Variabel PAD yang diprosikan oleh realisasi PAD memiliki nilai minimum sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 0,30, nilai rata-rata sebesar 0,2000, dan standar deviasi sebesar 0,03427. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data PAD memiliki keragaman data yang kecil. PAD dengan nilai minimum sebesar 0,14 terdapat pada kabupaten Majalengka, kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Bandung barat pada tahun 2015.

b. Dana Perimbangan (X2)

Variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 0,03, nilai maksimum sebesar 0,26, nilai rata-rata sebesar 0,2000, dan standar deviasi 0,02552. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dana perimbangan memiliki keragaman data yang besar. Dana perimbangan dengan nilai minimum sebesar 0,03 terdapat pada kabupaten majalengka tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,23 terdapat pada kabupaten Purwakarta, kabupaten Bandung dan kabupaten Ciamis tahun 2019.

c. Belanja Modal (X3)

Variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 0,13, nilai maksimum sebesar 0,29, nilai rata-rata sebesar 0,2000, dan standar deviasi sebesar 0,03013. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data belanja modal memiliki keragaman data yang kecil. Belanja modal dengan nilai minimum sebesar 0,13 terdapat pada kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 0,29 terdapat pada kabupaten Bandung 2019.

d. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh realisasi PDRB memiliki nilai minimum sebesar 0,17, nilai maksimum sebesar 0,23, nilai rata-rata sebesar 0,2000 dengan standar deviasi sebesar 0,01584. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data pertumbuhan ekonomi memiliki keragaman data yang kecil. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai minimum sebesar 0,17 yang terdapat pada kota Bandung dan Depok tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0,23 terdapat pada kabupaten Kuningan, kabupaten Majalengka, kota Bandung, kota Depok dan kota Cimahi tahun 2019.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan sudah tepat untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Suatu model yang baik adalah yang berdistribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan di dalam penelitian ini :

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01091721
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.049
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.114 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.106
		Upper Bound	.122
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Di dalam uji normalitas menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* yang telah disajikan di atas menunjukan nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar 0,114, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan melihat ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi masalah multikolinearitas Uji multikolinearitas menghasilkan nilai *tolerance* dan VIF dari setiap variabel bebas, apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam data dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji multikolinearitas yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.114	.009		12.077	.000		
	PAD	.227	.030	.490	7.675	.000	.889	1.124
	DAPER	.258	.040	.416	6.403	.000	.858	1.165
	BELANJA MODAL	-.053	.033	-.101	-1.629	.106	.945	1.058

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

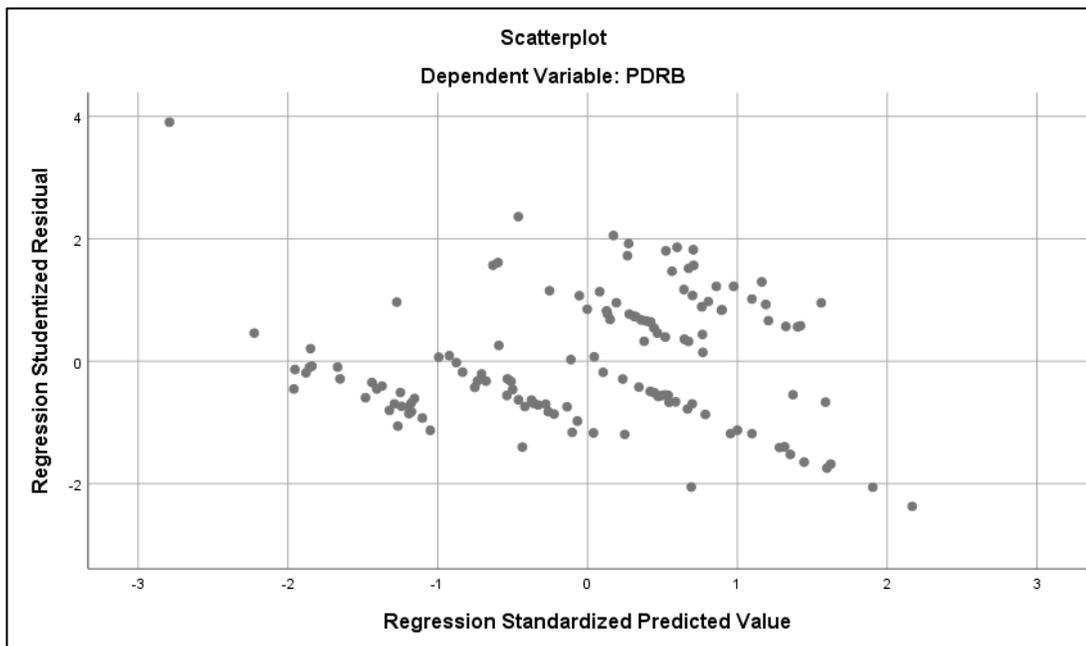
Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diketahui bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dimulai dari PAD sebesar 0,889, dana perimbangan (DAPER) sebesar 0,858, dan belanja modal sebesar 0,945.

Selain itu, setiap variabel independen juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Dimulai dari PAD sebesar 1,124, dana perimbangan (DAPER) sebesar 1,165, dan belanja modal sebesar 1,058. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dan asumsi terpenuhi.

4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model terjadi kesamaan variance dan residual antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan di dalam penelitian ini :

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas melalui grafik scatterplot dapat terlihat suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji autokorelasi yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.725 ^a	.525	.514	.01104	1.988

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD, DAPER

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Dari data SPSS di atas diketahui bahwa :

- Uji statistik

$$DW = 1,988$$

$$dl = 1,6738$$

$$du = 1,7645$$

$$(4-dl) = 2,3262$$

$$(4-du) = 2,2355$$

Nilai DW terletak diantara du dan (4-du)

- Keputusan

Hasil perhitungan diatas bahwa nilai DW sebesar 1,988 terletak diantara du dan (4-du) sebesar 1,7645 dan 2,2355 ($du < DW < 4-du$) maka dapat dilihat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.114	.009		12.077	.000
	PAD	.227	.030	.490	7.675	.000
	DAPER	.258	.040	.416	6.403	.000
	BELANJA MODAL	-.053	.033	-.101	-1.629	.106

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom *Unstandardized Coefficient*. PAD merupakan proksi dari Pendapatan Asli Daerah, DAPER melambangkan Dana Perimbangan dan BELANJA MODAL melambangkan Belanja Modal. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi seperti berikut:

$$Y = 0,114 + 0,227 X1 + 0,258 X2 - 0,053 X3$$

atau

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 0,114 + 0,227 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + 0,258 \text{ Dana Perimbangan} - 0,053 \text{ Belanja Modal}$$

Model regresi linier berganda di atas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,114 menjelaskan jika variable pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,114.
2. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sejumlah 0,227 menjelaskan variable pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai koefisien bertanda positif. Sehingga jika nilai pendapatan asli daerah naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi naik

sejumlah 0,227 satuan, begitu pula sebaliknya jika nilai pendapatan asli daerah turun satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi pun turun sejumlah 0,227 satuan.

3. Nilai koefisien dana perimbangan sejumlah 0,258 menunjukkan bahwa variable dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai koefisien bertanda positif. Jika variabel dana perimbangan naik satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel pertumbuhan ekonomi sejumlah 0,258 satuan, begitu pula sebaliknya jika variabel dana perimbangan pun turun satu satuan maka akan menurunkan nilai variable pertumbuhan ekonomi sejumlah 0,258 satuan.
4. Nilai koefisien belanja modal sejumlah -0,053 menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai koefisien bertanda negatif. Sehingga jika variabel belanja modal naik satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel pertumbuhan ekonomi sejumlah -0,053 satuan, begitu pula sebaliknya jika variabel belanja modal turun satu satuan maka akan menurunkan nilai variabel pertumbuhan ekonomi sejumlah -0,053 satuan.

4.2.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05 (Sig. < 0,05), maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengujian koefisien regresi secara parsial di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.114	.009		12.077	.000
	PAD	.227	.030	.490	7.675	.000

	DAPER	.258	.040	.416	6.403	.000
	BELANJA MODAL	-.053	.033	-.101	-1.629	.106

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil uji t di atas, berikut adalah interpretasi atas hasil uji tersebut:

1. Nilai t hitung variable PAD yang diprosikan oleh realisasi PAD sebesar 7,675 sedangkan t tabel sebesar 1,97824. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($7,675 > 1,97824$) dan nilai signifikansi hasilnya 0,000 dimana $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan H1 diterima
2. Nilai t hitung variabel Dana Perimbangan sebesar 6,403. Sedangkan t tabel sebesar 1,97824. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($6,403 > 1,97824$) dan nilai signifikansi hasilnya 0,000 dimana $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan H2 terima
3. Nilai t hitung variabel Belanja Modal sebesar -1,629 sedangkan t tabel sebesar 1,97824. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-1,629 < 1,97824$) dan nilai signifikansi hasilnya 0,106 dimana $0,106 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan H3 ditolak.

4.2.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji F di dalam penelitian ini:

Tabel 4.13

Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.018	3	.006	48.295	.000 ^b
	Residual	.016	131	.000		
	Total	.034	134			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD, DAPER

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 48,295 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05, $df_1 = 3$ dan $df_2 = 131$ adalah sebesar 2,67 atau ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($48,295 > 2,67$). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga H4 diterima.

4.2.4.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi di dalam penelitian ini :

Tabel 4.14

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.514	.01104

a. Predictors: (Constant),BELANJA MODAL, PAD, DAPER

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil uji di atas, terlihat bahwa nilai *R Square* (R^2) adalah sebesar 0.525 atau 52,5%. Hal ini berarti bahwa di dalam penelitian ini variabel – variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi 52,5% sedangkan sisanya sebesar 47,5% ($100\% - 52,5\% = 47,5\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(H1), Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H2), Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H3), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (H4). Berikut hasil hipotesis penelitian ini:

Tabel 4.15
Hasil Hipotesis penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Diterima
H2	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Diterima
H3	Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Ditolak
H4	Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	Diterima

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji parsial maka Pendapatan Asli Daerah dengan proksi realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan proksi PDRB. Semakin besar PAD akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Badrudin (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandika (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji parsial maka Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan proksi PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik

terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari : 1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Aloksi Khusus, dan 3) Dana Bagi Hasil. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2019 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula. (Bastian, 2016)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan, I. P., dan Karmini, N. L (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahrudin (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji parsial maka Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan proksi PDRB. Pelaksanaan Belanja Modal sangat penting dilaksanakan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah dan memenuhi pelayanan publik yang baik. Peningkatan Belanja Modal berupa belanja bangunan, irigasi, jalan serta infrastruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak berpengaruhnya Belanja Modal karena belanja yang digunakan dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif, selain itu dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek, pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh kurang tepatnya kebijakan yang kurang tepat dalam mengalokasikan belanja modal sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Perlu adanya kebijakan dari pihak terkait dalam menyusun anggaran belanja yang lebih memperhatikan dampaknya secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengadaan fasilitas umum yang memadai dan pembangunan infrastruktur secara merata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam daerah dengan peningkatan belanja modal dari tahun ketahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindya Kurniasari (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal, Haq dan Surono (2017) yang menyatakan dana belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji di atas, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat menjadi perhatian kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar lebih memerhatikan unsur ini. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Ketiga unsur ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan PAD akan memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Angka PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi dan untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Dana Perimbangan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah maka dana perimbangan menjadi salah satu meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini dijelaskan dengan tingkat konsumsi pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin tinggi tingkat Belanja Modal maka semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Diharapkan banyaknya aset tetap tersebut menjadi sarana prasarana naiknya pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saraswati (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi kab/kota di Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019. Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 7,675 dimana t hitung lebih besar dari t tabel 1,97824 ($7,675 > 1,97824$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung sebesar 6,403 dimana t hitung lebih besar dari t tabel 1,97824 ($6,403 > 1,97824$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,106 yang lebih besar dari 0,05 ($0,106 > 0,05$) dan nilai t hitung sebesar -1,629 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel 1,97824 ($1,629 < 1,97824$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap Y.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi tahun Jawa Barat 2015 – 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). dan F hitung 48,295 dimana F hitung lebih besar dari F tabel ($48,295 > 2,76$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal dan hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diharapkan menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih berikutnya serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti kajian yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. Untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019 mengenai Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Penelitian ini nantinya diharapkan agar mampu memberikan pandangan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah pusat

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Barat dan sebagai pengetahuan perhitungan mengenai anggaran pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.

3. Bagi Dinas Perpajakan

Untuk mengetahui besaran pajak yang didapat dari kab/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2015. Dan untuk membantu mempermudah dalam menganalisis pajak di kab/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Serta dapat dijadikan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat khusus daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai pengetahuan dan informasi mengenai dana yang didapatkan dari PAD, dana perimbangan dan belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepada masyarakat umum sebagai pengetahuan jika PAD, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Ani, N. L., and Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014), 6, 481-497.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampak Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan. *Jurnal EBBANK* ▪ Vol.6 ▪ No. 1 ▪ Hal.1-18, 6, 1-8.
- Badrudin, M. M. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *TELAAH BISNIS*, 17, 81-87.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 12. No. 2, Juli -Desember 2017 ISSN: 2085-1960*, 12, 67-74.
- Dewi, N. W., & Suputra, I. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3. Maret (2017), 1745-1757.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Guntara, P. C., and Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 (2014), 7, 529-546.
- Irvan, I. P., and Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud*, 5 [3], 5, 338-362.
- Kurniasari, A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Kusumawati, Lily, and I. Gusti Bagus Wiksuana. "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen* 7.5 (2018): 2592-2620.
- Lisa, Y., and Priyagus. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19 (2), 162-173
- Manek, Marianus, and Rudy Badrudin. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Telaah Bisnis* 17.2 (2016): 81-98.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 0164.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Ndede Y., Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16(3), 586-595.2.
- Nofrizal, E., Haq, A., & Surono, S. E., (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 01(01), 1-15. Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1104> [Diakses 7 Agustus 2020]
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Paat, Dewi Chrisanty, Rosalina AM Koleangan, and Vekie Adolf Rumate. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19.1 (2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Putro, Nugroho Suratno & Pamudji, Sugeng. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. <http://eprints.undip.ac.id/26411/2/jurnal.pdf>.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen DalamNegeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8.1 (2016): 9-16.
- Rori, Chindy Febry. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013." *E-Jurnal Unsrat* 16.2 (2016).
- Saraswati, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *E-Jurnal UPPB*, 8, 45-55.
- Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Yogyakarta: UNY*.
- Subekan, Achmat. 2012. *Keuangan Daerah*. Malang: Dioma.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit FE-UI dan Bina Grafika.
- Supartoyo Y.H., Tatum J & Sendouw R.H.E. 2013. The economic growth and the regional characteristics : the case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Juli 2013, 3-19.
- Suwandika, P. E., and Yasa, I. N. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP Unud*, 4 [7] : 794-810, 4, 794-810.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Cet-7)*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 174 Tentang Cipta Kerja. *Jakarta (ID): RI*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dias Tri Damara
Alamat : Kp. Warung Kawung RT 002 / RW 001, Kecamatan
Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43356.
Tempat, Tanggal, Lahir : Sukabumi, 04 Agustus 1997
Umur : 23 Tahun
Pendidikan
• SD : SDN Warung Kawung
• SMP : SMPN 1 Nagrak
• SMA : SMAN 1 Parungkuda
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 30 Juni 2021

Penulis

(Dias Tri Damara)

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Data Pendapatan Asli Daerah yang telah dihitung menggunakan proksi realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	229.170.387.972	253.441.395.870	384.398.431.333	303.218.052.848	301.403.914.672
Kab. Majalengka	283.735.793.231	331.527.312.738	513.783.824.022	449.974.129.889	439.843.264.595
Kab. Purwakarta	331.073.426.247	341.116.143.869	472.480.560.976	368.851.052.594	420.353.733.502
Kab. Subang	313.886.383.831	360.621.832.907	581.282.665.118	400.755.045.571	463.310.453.324
Kab. Sukabumi	509.484.993.709	548.936.246.392	799.499.855.484	565.369.086.733	619.788.612.706
Kab. Sumedang	327.369.262.021	345.804.901.984	553.257.332.797	432.181.933.419	463.528.449.322
Kab. Tasik	186.487.256.315	216.226.994.099	401.502.016.966	248.420.386.329	288.290.693.896
Kota. Bandung	1.859.694.643.505	2.152.758.191.084	2.578.457.420.885	2.571.591.786.199	2.548.258.990.275
Kota. Bekasi	1.497.596.390.244	1.607.393.559.507	1.988.356.922.193	2.001.150.459.494	2.442.151.873.746
Kota. Bogor	627.597.050.141	783.873.842.681	978.197.741.947	912.197.971.289	1.015.884.216.920
Kota. Cirebon	319.893.842.205	363.118.155.613	443.929.979.594	440.436.420.967	434.208.148.078
Kota. Depok	818.204.601.265	922.298.054.892	1.210.748.605.561	1.059.700.280.694	1.293.003.769.037
Kota. Sukabumi	276.845.561.835	295.257.395.672	359.024.019.506	362.342.290.539	330.946.584.148
Kota. Tasik	242.979.820.518	254.532.564.419	354.840.203.843	280.014.887.927	290.971.707.718

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kota. Cimahi	268.807.074.332	286.050.132.968	383.911.991.302	335.016.530.127	360.955.331.173
Kota. Banjar	119.829.130.610	116.321.781.013	125.454.618.137	116.167.055.635	100.745.347.096
Kab. Bandung Barat	314.621.268.983	376.221.149.262	609.916.387.808	422.341.026.545	528.087.033.271
Kab. Pangandaran	64.506.109.613	66.385.348.153	83.591.302.088	111.217.120.145	114.813.035.209
Kab. Bogor	2.002.209.819.262	2.292.178.638.051	3.041.872.447.905	2.794.660.740.152	3.161.165.915.498
Kab. Cianjur	454.627.908.742	455.156.491.161	535.232.527.172	569.844.590.576	628.558.761.864
Kab. Bekasi	1.843.836.910.285	1.917.814.908.833	2.311.805.849.243	2.094.369.342.687	2.439.368.558.406
Kab. Karawang	1.056.605.776.486	1.003.391.572.098	1.398.309.963.116	1.169.569.261.196	1.356.319.882.910
Kab. Bandung	784.216.215.215	856.514.601.823	936.905.730.680	927.543.321.132	1.025.354.252.358
Kab. Garut	419.201.758.615	385.312.442.433	692.255.365.083	421.299.024.535	486.565.326.730
Kab. Ciamis	180.304.950.790	204.759.820.709	223.076.019.909	234.610.670.215	264.280.368.264
Kab. Cirebon	478.690.101.565	529.050.148.252	779.337.852.278	584.810.843.482	638.421.049.236
Kab. Indramayu	346.871.269.287	351.176.916.498	577.594.379.049	419.892.815.093	450.063.256.102

LAMPIRAN 2

Data Dana Perimbangan yang telah dihitung menggunakan proksi realisasi dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus

Kab/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	1.374.529.144.140	1.717.086.642.360	1.721.906.216.207	1.662.033.402.105	1.740.991.070.659
Kab. Majalengka	1.367.195.047.862	1.723.842.229.706	168.990.115.291	1.668.010.124.763	1.672.256.633.918
Kab. Purwakarta	923.601.621.411	1.076.034.000.000	1.097.350.002.986	1.220.987.188.561	1.254.756.529.989
Kab. Subang	1.450.713.912.269	1.833.458.000.000	1.846.205.237.437	1.867.788.292.762	1.919.000.618.489
Kab. Sukabumi	1.777.394.505.302	2.210.394.000.000	1.949.722.280.221	1.964.152.558.370	2.465.721.366.986
Kab. Sumedang	1.269.358.454.244	1.611.297.930.389	1.594.548.731.778	1.638.676.633.162	1.742.184.434.785

Kab/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Tasik	1.633.950.690.991	2.079.587.223.463	2.083.179.479.122	2.067.009.180.838	2.160.615.166.635
Kota. Bandung	1.765.831.826.066	2.443.767.000.000	2.290.752.638.595	2.427.237.815.833	2.484.080.961.540
Kota. Bekasi	1.332.517.465.266	1.647.369.000.000	1.636.851.744.218	1.653.956.944.914	1.686.699.237.834
Kota. Bogor	814.953.434.916	1.097.615.148.408	1.072.486.473.770	1.066.762.734.201	1.106.494.405.814
Kota. Cirebon	773.113.885.766	870.838.242.483	819.338.166.831	814.145.269.518	803.587.681.346
Kota. Depok	975.526.903.366	1.118.681.000.000	1.160.692.889.899	1.158.659.583.597	1.227.549.178.965
Kota. Sukabumi	571.878.632.516	702.120.352.066	699.677.068.681	688.216.741.617	709.268.996.970
Kota. Tasik	849.187.546.730	1.077.545.560.416	1.114.721.743.585	1.145.172.887.845	1.140.745.750.458
Kota. Cimahi	628.232.060.766	783.781.972.794	820.783.188.232	788.025.064.842	801.160.744.727
Kota. Banjar	428.013.539.172	559.043.597.447	522.718.993.378	505.143.731.566	504.625.834.617
Kab. Bandung Barat	1.159.888.701.643	1.464.280.907.038	1.587.392.734.673	1.525.369.448.662	1.639.819.402.415
Kab. Pangandaran	619.657.543.100	698.289.540.495	811.595.965.687	787.754.579.727	864.020.472.345
Kab. Bogor	2.583.489.732.475	2.692.167.000.000	2.742.839.370.823	2.818.814.498.138	3.094.445.817.299
Kab. Cianjur	1.729.841.271.786	2.155.472.571.937	2.201.273.702.768	2.246.193.466.963	2.261.839.365.877
Kab. Bekasi	1.620.066.005.889	1.932.029.000.000	1.848.535.366.125	1.903.321.885.166	1.892.760.003.576
Kab. Karawang	1.623.936.961.915	1.959.377.000.000	2.017.808.510.547	2.048.785.689.308	2.138.791.255.642
Kab. Bandung	2.310.509.110.606	2.992.229.000.000	3.009.662.895.582	3.137.666.226.435	3.374.888.933.422
Kab. Garut	2.044.981.416.357	2.470.089.000.000	2.659.109.312.991	2.625.652.140.243	2.843.353.809.646
Kab. Ciamis	1.342.252.394.342	1.413.401.454.898	1.714.552.477.580	1.627.548.414.865	1.793.455.239.304
Kab. Cirebon	1.691.675.401.767	2.158.779.282.672	2.074.515.204.058	1.709.528.600.379	2.193.871.376.963
Kab. Indramayu	1.678.667.261.346	2.066.811.000.000	1.969.934.788.249	1.988.742.976.961	2.115.229.425.122

LAMPIRAN 3

Data Belanja Modal yang telah dihitung menggunakan proksi realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019

Belanja Modal = Biaya Tanah + Biaya Peralatan dan Mesin + Biaya Gedung dan Bangunan + Biaya Jalan, Biaya Irigasi dan Jaringan + Biaya Aset Tetap Lainnya.

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kuningan	393.510.702.302	328.557.000.000	327.877.830.627	221.662.068.961	251.909.012.385
Kab. Majalengka	672.132.609.304	631.758.000.000	605.772.199.991	681.604.696.830	643.663.697.855
Kab. Purwakarta	357.890.382.874	284.796.000.000	416.588.905.660	228.163.717.126	329.288.710.101
Kab. Subang	479.480.492.144	524.266.000.000	486.430.787.962	486.207.641.997	458.838.832.531
Kab. Sukabumi	508.051.546.242	551.261.000.000	545.840.507.028	614.381.109.002	603.785.439.571
Kab. Sumedang	557.223.725.256	465.362.000.000	498.572.941.044	410.348.713.390	605.698.351.012
Kab. Tasik	462.706.221.343	737.110.000.000	566.130.224.362	524.842.281.067	636.907.994.716
Kota. Bandung	1.287.802.827.811	1.254.020.000.000	918.875.016.069	1.015.003.770.589	1.179.429.469.424
Kota. Bekasi	1.249.954.669.378	1.428.030.000.000	1.236.086.622.628	780.096.411.798	1.104.382.128.418
Kota. Bogor	440.919.551.227	552.485.000.000	433.491.716.724	455.461.723.593	500.976.561.453
Kota. Cirebon	264.561.671.148	297.984.000.000	220.222.341.278	175.692.948.871	269.915.807.939
Kota. Depok	615.731.792.480	1.018.660.000.000	857.242.346.381	770.053.793.199	926.089.374.326
Kota. Sukabumi	166.212.543.933	205.502.000.000	217.077.378.623	140.100.688.338	192.377.946.747
Kota. Tasik	319.080.079.445	387.626.000.000	425.367.687.732	374.596.059.058	445.498.342.145
Kota. Cimahi	180.783.092.416	275.140.000.000	270.324.719.343	276.020.230.064	260.337.997.570
Kota. Banjar	194.774.353.115	281.994.000.000	215.242.342.160	193.782.528.967	208.991.724.826
Kab. Bandung Barat	374.320.053.732	355.712.000.000	400.093.042.859	264.540.319.500	338.001.326.884
Kab. Pangandaran	265.369.809.750	220.657.000.000	426.921.890.626	284.898.372.940	499.054.520.067
Kab. Bogor	1.459.647.299.638	1.541.830.000.000	1.525.152.052.623	1.313.835.412.090	1.567.693.720.671
Kab. Cianjur	581.323.220.540	616.245.000.000	823.214.700.634	928.610.308.238	690.653.593.571
Kab. Bekasi	1.165.153.095.189	1.302.250.000.000	971.090.629.160	853.621.639.952	954.900.806.872
Kab. Karawang	631.019.911.645	574.175.000.000	745.196.437.547	697.603.266.243	703.203.003.641

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bandung	708.464.526.697	569.468.000.000	628.497.495.405	713.093.010.272	1.088.249.765.480
Kab. Garut	578.732.262.315	597.238.000.000	615.046.392.421	537.593.476.982	553.083.799.225
Kab. Ciamis	492.668.741.650	549.753.000.000	452.171.458.810	442.374.318.119	520.316.832.767
Kab. Cirebon	439.768.587.939	610.530.000.000	609.568.213.960	510.923.940.462	587.833.779.153
Kab. Indramayu	713.948.024.551	937.844.000.000	776.090.158.448	769.879.618.700	982.685.411.027

LAMPIRAN 4

Pertumbuhan Ekonomi yang telah dihitung menggunakan proksi realisasi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto Tahun berjalan di (-) Tahun lalu

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	1.206.891,27	1 277 312,17	1 350 879,84	1 430 710,19	1 504 776,35
Bogor	124.486,98	131.760,37	139.561,45	148.204,83	156.868,30
Sukabumi	37.265,25	39.447,01	41.692,62	44.107,87	46.703,62
Cianjur	25.352,13	26.981,37	28.524,43	30.302,88	32.039,59
Bandung	64.701,52	68.804,85	73.039,45	77.603,12	82.373,18
Garut	31.919,06	33.803,54	35.464,91	37.224,18	39.092,49
Tasikmalaya	19.662,49	20.824,80	22.063,29	23.319,64	24.586,67
Ciamis	17.779,91	18.844,97	19.826,75	20.904,75	22.001,24
Kuningan	13.175,67	13.977,77	14.866,62	15.821,95	16.864,15
Cirebon	27.596,25	29.149,31	30.623,31	32.160,19	33.668,10
Majalengka	16.590,93	17.591,79	18.789,49	19.931,78	21.550,25

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sumedang	18.950,36	20.029,72	21.276,70	22.517,16	23.932,73
Indramayu	56.663,30	56.706,18	57.515,01	58.238,91	60.153,18
Subang	23.696,76	24.976,92	26.250,85	27.412,66	28.616,82
Purwakarta	37.899,02	40.169,90	42.229,76	44.340,41	46.281,71
Karawang	132.453,57	141.125,54	149.530,94	159.186,82	163.732,48
Bekasi	205.950,39	215.928,36	228.178,92	242.023,29	251.492,79
Bandung Barat	25.486,17	26.925,88	28.330,02	29.888,89	31.398,35
Pangandaran	6.271,10	6.602,73	6.939,64	7.315,30	7.742,87
Kota Bogor	25.298,60	27.002,25	28.654,97	30.413,57	32.253,51
Kota Sukabumi	6.985,33	7.379,48	7.780,42	8.208,78	8.661,02
Kota Bandung	149.580,38	161.227,83	172.851,96	185.084,18	197.642,89
Kota Cirebon	13.269,24	14.077,05	14.893,14	15.817,43	16.811,69
Kota Bekasi	55.456,07	58.831,08	62.202,01	65.844,24	69.408,57
Kota Depok	37.529,48	40.263,23	42.939,38	45.870,49	49.076,63
Kota Cimahi	17.876,44	18.882,16	19.907,13	21.038,45	22.856,04
Kota Tasikmalaya	12.370,62	13.225,25	14.027,80	14.861,53	15.746,12
Kota Banjar	2.624,24	2.772,84	2.918,87	3.066,88	3.221,37